

PENENTUAN TIPOLOGI PERKEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

TUGAS AKHIR

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRIR

L2D 300 369



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 4**

ABSTRAKSI

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu di Propinsi Jawa Tengah sebagai jalur utama pantura untuk menuju kota-kota lainnya. Hal ini didukung oleh kerajinan batik di Kota Pekalongan, memiliki dua fungsi yakni sektor primer dan sektor sekunder.

Dari dua sektor tersebut tingkat pelayanan antar kota-kota kecamatan sangat mendukung perkembangan wilayahnya, terutama kecamatan pada daerah jalur utama Pantura sangat berkembang karena dilalui oleh jalur pantura sedangkan di kecamatan di selatan kurang berkembang karena kondisi wilayahnya berada didaerah pegunungan dan perbukitan serta kurang mendukungnya sarana dan prasaranan.

Agar dapat tercapainya suatu gerak langkah pada kota-kota di Kabupaten Pekalongan, dalam arti tidak ada kesenjangan yang menolok dalam sistem kota dan perwilayahan. Pada kecamatan di jalur utama pantura dan selatan kecamatan Kabupaten Pekalongan sangat kurang menguntungkan pada kecamatan di selatan antara lain Kecamatan Kandangserang karena daerahnya kurang strategis dan banyaknya lahan yang mudah erosi dan sulit berhubungan antardesa, karena daerah tersebut rawan terhadap tanah longsor, sedangkan Kecamatan Panningaran jauh dari ibukota dan daratannya yang berbukit-bukit, dan Kecamatan Petungkriyono daerahnya berupa pegunungan dan perbukitan menyulitkan dalam pengembangan prasarana transportasi.

Perubahan kegiatan aktivitas ekonomi kecamatan pada daerah jalur utama Pantura dan kecamatan di selatan Kabupaten Pekalongan. Kajian terhadap laju pertumbuhan. Pertumbuhan tidaklah hanya merupakan lokalisasi sektor industri sebagai sektor pendorong, akan tetapi harus mampu mendorong ekspansi yang besar di wilayah sekitarnya, oleh karena itu pengaruh polarisasi strategis lebih menonjol dari pada ketergantungan antar indusrti. Prasarana yang sudah ada atau sudah berkembang itu karna di kecamatan jalur utama Pantura, tetapi pada kecamatan di selatan Kabupaten Pelakogan penyediaan sarana dan prasarana belum bekembang sedangkan penyediaan pelayanan pusat-pusat sentral belum terlaksanan dengan baik. Struktur/bentuk keruangan pada kecamatan di jalur utama Pantura dan kecamatan di selatan Kabupaten Pekalongan. Kajian terhadap pola pemanfaatan ruang, terhadap suatu hirarki kota terjadinya ketergantungan pada kota-kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, sehingga diharapkan tidak terjadi polarisasi yang kuat ke arah pusat pertumbuhan utama. Dan merangsang terbentuknya kutub-kutub baru sebagai pusat pelayanan terpadu, diutamakan pada wilayah pengembangan yang punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Melakukan upaya peningkatan keterkaitan antara wilayah kecamatan yang tergabung dalam satuan SWP (Sub Wilayah Pengembangan).

Seperti diketahui bahwa jenis dan bentuk aktivitas yang terdapat pada wilayah perkotaan menjadi sangat beragam dan saling mempunyai kepentingan yang berbeda. Untuk mengoptimalkan proses pengembangan fungsi-fungsi perkotaan serta untuk menghindari terjadinya konflik antarkegiatan tersebut, perlu dilakukan upaya pengalokasian kegiatan pada bagian ruang tertentu sesuai dengan karakteristik kegiatan serta daya dukung ruang terhadap kegiatan yang dikembangkan untuk jangka panjang (Yunus. 2000). Pada sisi lain, perkembangan aktivitas pada lingkungan perkotaan akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah arus urbanisasi dari wilayah hinterland ke dalam wilayah kota (Bryant. 1987).

Analisis Tipologi kecamatann dapat menganalisa rata-rata pertumbuhan dan tingkat pendapatan sehingga dapat diramalkan kecenderungan tingkat ekonomi perkecamatan di Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat diprediksikan tingkat perkembangan yang terjadi untuk masa mendatang. Pembentukan yang dilakukan dengan melakukan kajian mengkategorikan Klaassen dan tipologi kecamatan terhadap 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan, diolah dari berbagai literatur dan studi yang ada, kemudian dilakukan proses Kolaborasi dari dua analisis tipologi terhadap 16 kecamatan.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, kecenderungan terhadap kolaborasi dari dua analisis tersebut terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang masih tergolong tertinggal baik itukecamatan di jalur utama Pantura maupun kecamatan di selatan.perkembangan kecamatan bukan pada satu kecamatan saja melainkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Pada akhirnya, studi ini menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai arahan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai proses tipologi kecamatan, menunjukkan besarnya peranan sektor dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah atau kecamatan yang tertinggal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di jalur utama Pantura yang mempunyai akses untuk menuju ke daerah-daerah lainnya. Perkembangan Kabupaten Pekalongan, baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan daerah lain, terutama Kota Pekalongan yang berbatasan langsung dengan jalur utama Pantura Kabupaten Pekalongan.

Dari segi aktivitas di Kabupaten Pekalongan memiliki aktivitas yang terdiri dua sektor, yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer meliputi sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya, sedangkan sektor sekunder yaitu sektor industri, sektor perdagangan dan jasa. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, terlepas dari Kota Pekalongan sebagai wilayah yang didukungnya, Kabupaten Pekalongan juga mempunyai fungsi tersendiri sebagai simpul koleksi dan distribusi bagi kawasan-kawasan di dalamnya.

Dari dua sektor tersebut tingkat pelayanan antarkota kecamatan sangat mendukung perkembangan wilayahnya, terutama untuk kecamatan di jalur utama Pantura di Kabupaten Pekalongan yang lebih berkembang karena dilalui oleh jalur Pantura sedangkan pada kecamatan di selatan Kabupaten Pekalongan kurang berkembang karena kondisi wilayahnya berada di daerah pegunungan dan perbukitan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Pada pengembangan peran dan fungsi kota, secara spesifik dalam rencana tata ruang kota harus mempertimbangkan dengan saksama potensi yang dimiliki *hinterland*-nya, sehingga terjadi suatu keserasian interaksi antara pusat dengan wilayahnya (*core-periphery*) yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Pekalongan terdiri dari satu Ibukota Kabupaten dan enambelas Ibukota Kecamatan. Dalam aspek kebijakan, penataan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, dan seimbang dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*). Matra ruang

dalam pembangunan daerah dibutuhkan untuk mencapai pembangunan sektoral yang optimal. Maka perlu diusahakan agar kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang terjadi di daerah.

Kondisi umum kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang kurang menguntungkan terlihat pada kecamatan-kecamatan di selatan Kabupaten Pekalongan antara lain Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, dan Kecamatan Petungkriyono dengan daerahnya berupa pegunungan dan perbukitan yang rawan bencana sehingga menyulitkan interaksi antardesa dan membatasi pengembangan prasarana transportasi.

Adapun perbedaan perkembangan pada kecamatan di jalur utama Pantura dan di selatan Kabupaten Pekalongan yaitu perkembangan perkotaan seperti di Kecamatan Wiradesa mempunyai wilayah pendukung aktivitas yang cukup luas bahkan hingga luar SWP-nya, sebagai fungsi perdagangan dan jasa, serta industri. Sedangkan kecamatan di selatan tidak berkembang karena adanya keterbatasan fisik dasar yaitu sarana dan prasarana jaringan jalan yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan.

Seperti diungkapkan di atas bahwa perhatian terhadap perkembangan kecamatan di utara terutama jalur utama Pantura cenderung berkembang. Sedangkan kecamatan di selatan lebih lambat dikarenakan penyebaran pembangunan tidak merata dan lebih berkonsentrasi di jalur utama Pantura, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai kesenjangan/disparitas antarwilayah.

Menurut Budhy Tjahjati, 1991 mengemukakan bahwa terdapat dua permasalahan yang timbul seiring dengan proses pertumbuhan kota, yaitu permasalahan pada lingkup makro dan mikro. Pada lingkup makro, proses pertumbuhan kota akan menyebabkan terjadinya pergeseran peran kota dalam konstelasi sistem perkotaan. Sementara dalam lingkup mikro, pertumbuhan kota akan menyebabkan semakin kompleksnya perkembangan aktivitas masyarakat, peningkatan kebutuhan terhadap sumberdaya serta semakin langkanya jumlah dan jenis sumberdaya yang tersedia pada lingkungan kota yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengembangan aktivitas perkotaan.

Pada lingkup wilayah perkotaan seperti pada tingkat kecamatan di atas, kebutuhan terhadap adanya suatu rencana tata ruang yang berkualitas muncul sebagai akibat terjadinya proses pertumbuhan kota. Pertumbuhan wilayah maupun kota menyebabkan perlu dirumuskannya suatu kebijakan dasar yang mampu berfungsi sebagai pedoman bagi

seluruh komponen dalam kegiatan pengelolaan kota (Bryant, 1987) agar lingkungan kota dapat berfungsi secara ideal.

Seperti diketahui bahwa jenis dan bentuk aktivitas yang terdapat pada wilayah perkotaan menjadi sangat beragam dan saling mempunyai kepentingan yang berbeda. Untuk mengoptimalkan proses pengembangan fungsi-fungsi perkotaan serta untuk menghindari terjadinya konflik antarkegiatan tersebut, perlu dilakukan upaya pengalokasian kegiatan pada bagian ruang tertentu sesuai dengan karakteristik kegiatan serta daya dukung ruang terhadap kegiatan yang dikembangkan untuk jangka panjang (Yunus, 2000). Pada sisi lain, perkembangan aktivitas pada lingkungan perkotaan akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah arus urbanisasi dari wilayah *hinterland* ke dalam wilayah kota (Bryant, 1987), sehingga secara kuantitatif jumlah penduduk kota akan semakin bertambah. Pertambahan jumlah penduduk tersebut akan menyebabkan perlu dilakukannya upaya penambahan jumlah dan jenis infrastruktur kota agar kemampuan pelayanan infrastruktur serta daya dukung lingkungan kota dapat lebih disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Sebagai sebuah kebijakan yang berimplikasi terhadap aktivitas masyarakat secara luas dan bertujuan jangka panjang, maka dalam proses perumusan rencana tata ruang kecamatan, perlu melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya dukung lingkungan, serta sistem interaksi wilayah. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan akan dapat disusun kebijakan tata ruang yang berkualitas, yang mampu menyelesaikan permasalahan spasial yang berkembang pada saat sekarang serta mampu mengantisipasi dinamika permasalahan yang mungkin akan berkembang pada masa yang akan datang.

Pada pola pemanfaatan lahan/ruang pada suatu wilayah kabupaten dapat mencerminkan perkembangan tingkat pembangunan wilayah tersebut. Sebab penggunaan lahan bersifat dinamis dan selalu berganti menyesuaikan dengan dinamika pembangunan wilayah. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi penggunaan lahan untuk fungsi yang beragam yaitu permukiman, pertanian lahan kering, sawah, perkebunan, peternakan, perikanan, perhubungan, areal berhutan, tanah kritis/rusak, padang rumput, industri, pertambangan terbuka dan sebagainya.